**Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan**.

**Oleh:**

**Olga Y. L. Lintjewas [[1]](#footnote-2)**

**Femmy Tulusan [[2]](#footnote-3)**

**Maxi Egeten [[3]](#footnote-4)**

**Abstract**

*The aim of this study "Evaluating Policy Assistance Mina Rural Enterprise Development (PUMP) in South Minahasa Regency". This study used a qualitative approach with descriptive analysis method. Sources of primary data obtained through interviews with a purposive sampling techniques and secondary data from documents, files, internet, and other sources associated with the research.*

*The survey results revealed Implementation Program Direct Community Assistance (BLM) Mina Rural Enterprise Development (PUMP) in South Minahasa Regency has gone well. All processes are carried out in compliance guidelines. All of these mechanisms have been implemented according to their respective authorities ranging from the establishment of a technical team to the receiver group selection. Since the program was rolled in South Minahasa Regency (years 2011-2015), as many as 73 groups have received this assistance and has been used for business development in the field of fisheries, aquaculture, processing and marketing of fishery products. Implementation of this program has had an impact on the implementation of this program. The perceived impact of fish production increased compared to before receiving this assistance. Likewise with income, an increase when compared with the initial conditions before granting aid.*

***Keywords: Evaluation, Policy***

**PENDAHULUAN**

Salah satu urusan pemerintah yang menjadi urusan pilihan adalah urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan. Diantara upaya yang telah dan sedang giatnya dilakukan pemerintah dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat adalah pengelolaan sektor perikanan.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat adalah program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). PUMP merupakan pendekatan pengembangan usaha pelaku utama perikanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Program PUMP, baru dirasakan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2011. sampai tahun 2015 total anggaran yang dikucurkan lewat program PUMP sebesar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebanyak Rp5.720.000.000 (*lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*). Jumlah tersebut diberikan kepada 73 kelompok pelaku utama perikanan di bidang Perikanan Tangkap 36 kelompok, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) 15 kelompok, dan Perikanan Budidaya 22 kelompok.

Program PUMP, telah berjalan di Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan penelusuran literatur dan informasi dari para kerabat, hingga tahun 2015 belum ada satupun kajian ilmiah dari berbagai strata dilakukan terhadap implementasi dari program ini. Karena itu, bagian dari tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan termotivasi untuk melakukan kajian berdasarkan kaida-kaida ilmiah yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) di Kabupaten Minahasa Selatan”.* Karena itu tujuan dari pelaksanaan penelitian ini ialah *“Mengevaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) di Kabupaten Minahasa Selatan”*.

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kebijakan Publik**

Sebagaimana dikemukakan oleh Titmuss yang dikutip oleh Edi Suharto (2012) memberikan definisi tentang kebijakan adalah “sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu”. Menurut Timuss, kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Oleh karena itu kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Faried Ali dan Andi Syamsu Alam (2012), memberikan pengertian bahwa “kebijakan sebagai pernyataan kehendak atas pilihan alternatif yang dikehendaki untuk dilakukan dan yang dibangun atas dasar pengaturan kehendak dalam aktualisasinya dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan”. Pilihan alternatif yang dikehendaki oleh pemerintah yang dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan merupakan langkah-langkah yang ingin dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Anderson (Solichin Abdul Wahab, 2004) merumuskan kebijakan pemerintah sebagai berikut “langkah-langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi” Sedangkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kebijakan pemerintah adalah sebagai kegiatan yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik adalah ”hubungan dari unit pemerintah dengan lingkungannya”. Dun 1981 (Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, 2012) yang menyatakan bahwa kebijakan dianggap sebagai rangkaian yang panjang dari kegiatan yang saling berhubungan dan saling berakibat dalam pengambilan kepuusan.

1. **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefesienannya. Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002) menyatakan evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu: (1) untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya ?, (2) untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan; (3) untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Menurut Agustino (2006) Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi :

1. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
2. Tindakan yang ditempuh oleh *Implementing Agencies* sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel dan adil ini. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga.
3. Efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat.
4. **Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Bridgman & Davis (2000) Pengukuran evaluasi kebijakaan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : (1) indikator *input*, (2) indikator *process*, (3) indicator *outputs* dan (4) indicator *outcomes*. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator *proses* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Evaluasi administratif memerlukan kumpulan informasi yang tepat untuk penyampaian program dan himpunannya dengan cara dibakukan dengan mengadakan perbandingan biaya dan hasil dari waktu ke waktu dan melewati sektor kebijakan. Evaluasi yudisial menyangkut persoalan hukum, dimana berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan program pemerintah dilaksanakan, yang biasanya dilaksanakan pengadilan. Sedangkan evaluasi politik berusaha untuk mengatasnamakan suatu kebijakan yang berhasil atau gagal yang diikuti oleh permintaan untuk dilanjutkan atau perubahan.

Menurut Crossfield & Byrner (1994) evaluasi kebijakan publik merupakan penilaian kinerja dari sebuah program atau kebijakan dengan pertanyaan dasar : (1) apakah input yang digunakan telah memaksimalkan outputnya?, (2) apakah dampak yang diinginkan telah tercapai sebagaimana tujuan tertulisnya?, (3) apakah kebijakan tersebut selaras dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan rakyatnya?. Untuk memudahkan tentang pengukuran evaluasi kebijakan Badjuri & Yuwono (2002) menyajikan tabel indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :

**Tabel Indikator Evaluasi Kebijakan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Fokus Penilaian** |
| 1. | Input | 1. apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan? 2. Berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan? |
| 2. | Process | 1. bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat? 2. Bagaimanakah efektivitas dan efesiensi dari metode/cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut? |
| 3. | Outputs | 1. apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik? 2. berapa orang yang berhasil mengikuti program/kebijakan tersebut? |
| 4. | Outcomes | 1. apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan? 2. berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? 3. adakah dampak negatifnya? seberapa seriuskah? |

Sumber : Badjuri & Yuwono (2002)

Model-model Evaluasi Kebijakan

1. **Model Helmut Wollman**

Menurut Wollman (2007) terdapat 3 tipe evaluasi kebijakan yaitu *Ex-ante evaluation*, *Ongoing evaluation* dan *Ex-post evaluation.*

a). *Ex-ante evaluation*. Adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Secara hipotetik evaluasi tipe ini ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal tentang perkiraan efek atau dampak serta konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. *Ex-ante evaluation* adalah instrument penting dari penentuan pilihan dari berbagai opsi kebijakan yang ada. Evaluasi tipe ini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.

b). *Ongoing Evaluation*. Mengidentifikasi dan mengukur dampak dan hasil dari program yang sedang berjalan. Esensi dari *Ongoing evaluation* adalah untuk memberikan informasi yang relevan, kembali pada proses implementasi kebijakan, terutama pada tahapan tertentu dari implementasi kebijakan saat informasi tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki, revisi, “meluruskan” kembali proses implementasi kebijakan ke araah yang sesungguhnya ingin dicapai.

c). *Ex-post evaluation*. Menurut Wollman ini merupakan varian klasik dari evaluasi kebijakan. Evaluasi ini ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Ini juga merupakan evaluasi hasil kebijakan.

2. **Model Lester dan Steward, Jr**

Lester dan Steward mengkategorisasi evaluasi kebijakan menjadi empat tipe. Adapun tipe atau model yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

a). Evaluasi Proses. Evaluasi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan,

b). Evaluasi Dampak. Evaluasi yang berkaitan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan.

c). Evaluasi Kebijakan. Evaluasi untuk menguji kesesuaian antara hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai.

d). Meta Evaluasi. Evaluasi terhadap berbagai implementasi kebijakan yang ada, untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

**3. Model Anderson**

Anderson dalam Winarno (2002) membagi evaluasi implementasi kebijakan publik menjadi tiga. Pertama, evaluasi implementasi kebijakan publik dipahami sebagai kegiatan fungsional. Ke dua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah tercapai.

**4. Model Jones**

Secara umum menurut Jones (1984) evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan, menyangkut substansi, implementasi dan dampaknya. Menurut Jones (1985) kemudian bahwa evaluasi kebijakan dimaknai dari bagaimana evaluasi kebijakan itu dikategorikan dalam pemerintahan, yaitu mengarah kepada “program kepada pemerintah”. Sementara itu program yang bersifat individual dikembalikan kepada pemerintah untuk pembahasan dan pertimbangan bagi pengembangan selanjutnya.

Jones (1984) mengemukakan bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk 3 tujuan, yaitu :

* 1. *Political evaluation* (evaluasi bersifat politis). Dilakukan untuk melihat apakah program memberikan manfaat bagi negara. Dapatkah ini ditafsirkan untuk membuka peluang bagi *re-election*, untuk mendapatkan dukungan media, atau untuk mendapatkan sumbangan kampanye.
  2. *Organization evaluation* (evaluasi yang bersifat organisasional). Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban tentang apakah kebijakan atau program yang dilakukan, melahirkan dukungan bagi badan-badan pelaksana. Apakah manfaat bagi badan-badan tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Apakah kebijakan yang dilakukan, mengarah pada pada perluasan lebih lanjut bagi badan-badan tersebut.
  3. *Substantive evaluation* (evaluasi yang substantive atau bersifat nyata). Yaitu evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah kebijakan atau program yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara hukum maupun dalam detail kebijakan yang ingin dicapai selanjutnya, serta apa dampak kebijakan atau program tersebut bagi persoalan yang dituju.

**METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan pada kisaran waktu November - Desember 2015 dan Januari - Februari 2016. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Evaluasi PUMP di Kabupaten Minahasa Selatan**

Sebagaimana diungkapkan Badjuri dan Yuwono (2002) dan ditegaskan dalam proposisi, evaluasi terhadap pelaksanaan PUMP di kabupaten Minahasa Selatan menggunakan indikator evaluasi kebijakan Input, Proses, Output dan Outcomes.

1. **Indikator Input**

Indikator Input yang dimaksud adalah apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan dan berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Hasil wawancara dengan informan, Kepala Dinas, Kabid Tangkap dan Budidaya serta tenaga pendamping PUMP di kabupaten Minahasa Selatan mengungkapkan semua mekanisme telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman teknis pelaksanaan PUMP. Kewenangan kabupaten/kota sesuai pedoman teknis membentuk tim teknis telah dilaksanakan dengan ketua tim Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Minahasa Selatan dengan anggota Kepala Bidang Tangkap dan Kepala Bidang Budidaya serta para staf di setiap bidang. Tim teknis telah menjalankan tugas, sehingga kelompok penerima terpilih melalui proses seleksi.

1. **Indikator Proses**

Indikator proses yang dimaksudkan ialah bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dan bagaimana efektifitas dan efisiensi dari metode/cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Jika dikaitkan dengan materi dasar pada penelitian ini mengenai PUMP, dapat diartikan bagaimana penentuan kelompok penerima dan bagaimana penyaluran hingga sampai ke penerima dan pemanfaatannya.

Hasil penelitian terungkap proses seleksi kelompok penerima dilakukan melalui sistem *bottom up*. Menurut informan dari pendamping dan kelompok penerima, proses pengusulan pencairan dan pemanfaatan semuanya telah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur. Sejak dana masuk ke rekening, pengambilan di bank dan pembelian bahan sesuai RUB didampingi tim pendamping.

Kelompok penerima PUMP Tangkap, PUMP Budidaya, dan PUMP-P2HP telah memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan membeli semua keperluan: Untuk PUMP Tangkap bantuan yang diberikan digunakan untuk membuat rumpon laut dalam, mesin katinting, perahu, motor temple, jaring, genset, dan lainnya. Dua puluh persen dari total bantuan yang diterima merupakan biaya operasional (digunakan untuk membeli BBM, es, logistic, dan air bersih. PUMP P2HP digunakan untuk membeli cool box, freezer, loyang, keranjang dan peralatan pengolahan lainnya.

1. **Indikator Output**

Indikator Output yang dimaksudkan apa hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik dan berapa orang yang berhasil mengikuti program/kebijakan tersebut. Hasil penelitian diperoleh sejak tahun 2011 - 2014 sebanyak 73 kelompok telah menerima bantuan langsung masyarakat (BLM) melalui Program PUMP, dengan total anggaran yang dikucurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp5.720.000.000 (*lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*). Jumlah tersebut diberikan kepada 36 kelompok tangkap yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan total anggaran Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang menerima bantuan melalui PUMP Budidaya sebanyak 22 kelompok dengan total dana Rp1.430.000.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah). Kelompok pengolah dan pemasar (Poklasar) yang menerima bantuan melalui PUMP-P2HP sebanyak 15 kelompok dengan total dana Rp690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Berdasarkan wawancara langsung dengan para informan, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan sampai kelompok penerima, bantuan telah disalurkan sesuai pedoman teknis yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Semua kelompok penerima telah menerima dana utuh sesuai besaran setiap kelompok.

1. **Indikator Outcomes**

Indikator outcomes yang dimaksud adalah apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan, berapa banyak dampak positif yang dihasilkan dan apakah ada dampak negatifnya. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, yang patut diungkap dalam indikator ini, apakah program PUMP memberi perubahan terhadap kelompok penerima dalam hal jumlah produksi ikan (tangkap dan budidaya) dan pendapatan pengolah dan pemasar. Dampak positif yang dirasakan, ketika produksi ikan meningkat maka terjadi peningkatan pendapatan para penerima. BLM PUMP sebagaimana menurut informan, memberi dampak terhadap penerima. PUMP tangkap, dari 36 kelompok penerima, rata-rata kelompok penerima merasakan dampaknya melalui peningkatan produksi ikan hasil tangkapan dan pendapatan yang diperoleh.

**PENUTUP**

Seluruh kegiatan penelitian telah dilaksanakan dan berdasarkan uraian yang telah dikemukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) di Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan baik.
2. Semua proses yang dilakukan telah sesuai pedoman yang ditetapkan. Semua mekanisme telah dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing mulai dari pembentukan tim teknis hingga seleksi kelompok penerima. Sejak program ini bergulir di Kabupaten Minahasa Selatan, (tahun 2011 - 2015), sebanyak 73 kelompok telah menerima bantuan ini dan telah dimanfaatkan untuk pengembangan usaha di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Pelaksanaan program ini telah memberikan dampak dari pelaksanaan program ini. Dampak yang dirasakan produksi ikan meningkat dibandingkan sebelum menerima bantuan ini. Begitu juga dengan pendapatan, terjadi peningkatan bila dibanding dengan kondisi awal sebelum pemberian bantuan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan secara rutin melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan sosial terutama manajerial kelompok dan terus mendorong agar aktifitas pemberdayaan yang dilaksanakan tidak hanya ketika tersedianya anggaran dari pemerintah, tetapi secara terus menerus. Penerima bantuan agar memiliki minat menabung.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabetha.

Agustino, L. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Undip Press. Semarang.

Bridgman, J & Davis G. 2000. Australian Policy Handbook, Allen & Unwin, NSW

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua. Gajah Mada University Press. Jogjakarta

Faried Ali, Andi Syamsu Alam, Sastro M. Wantu. 2012. Studi Analisa Kebijakan. Bandung: PT. Refika Aditama

Hanafi, A., Guntur M. 1984. Penelitian untuk mengevaluasi efektivitas program Kemasyarakatan. Surabaya: Usaha Nasional

Howlett, Michael, and M. Ramesh. 2003. Studying Public Policy : Policy cycles and policy subsystem second Edition. New York : Oxford University Press.

Istianto, Bambang. 2009. Manajemen pemerintahan dalam perspektif pelayanan publik. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Jones, Charles. O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Lababa, Djunaidi. 2008. Evaluasi Program: sebuah pengantar. Jakarta.

Lewis, O. 1993. Kebudayaan Kemiskinan. Dlm Parsudi Suparlan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media. Computindo.

1. Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi [↑](#footnote-ref-2)
2. Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi [↑](#footnote-ref-3)
3. Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi [↑](#footnote-ref-4)